

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan dasar hariannya. Masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap negara termasuk Indonesia (Adawiyah, 2020). Permasalahan kemiskinan memang perlu segera diatasi agar tidak memunculkan persoalan lain seperti persoalan sosial, ekonomi dan politik di lingkungan masyarakat. Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia, secara tidak langsung diikuti dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Berkaitan dengan hal itu, maka diperlukan program penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. Pemerintah memiliki peranan penting dalam bertindak dengan memberikan program bantuan sosial kepada masyarakat miskin (Angga, 2022).

Tuntunan-tuntunan masyarakat terhadap pemerintah melalui pelayanan-pelayanan tentu sangat tinggi karena sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduknya dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Karena selain dirasakan oleh masyarakat juga sekaligus mengukur berhasil tidaknya proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan semakin berkurangnya penduduk miskin yang diharapkan masyarakat merasakan kesejahteraan. Adanya program pemerintah tersebut ditujukan sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat mewujudkan keluarga sejahtera (Fanny & Megawati, 2022).

Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia membuat program yaitu beras miskin (raskin). Raskin merupakan program dari pemerintah berupa bantuan beras bersubsidi untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pada tahun 2015 raskin berganti nama menjadi beras sejahtera, beras sejahtera merupakan program sama dengan raskin yang membedakan hanya sebutan untuk program tersebut. Program

beras sejahtera ini berganti nama menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT). Pengalihan itu, lebih mempermudah mencapai 6T dari program rastra, 6T yang dimaksud adalah tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi (Ansyah & Nur, 2022).

Pada awal tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/bulan. Selain itu, program sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya dan sebagai upaya pencegahan *stunting* (Gultom et al., 2020).

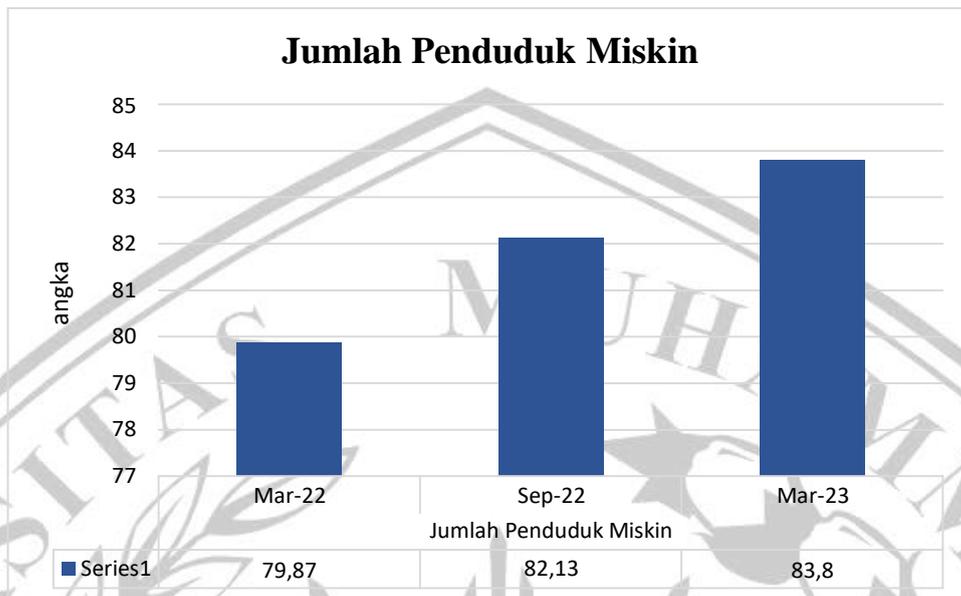
Mulai bulan maret 2020, indeks bantuan program sembako dinaikkan menjadi Rp.200.000/KPM/bulan, hal ini dilakukan karena seluruh dunia dikejutkan dengan kehadiran virus corona dan penyakitnya menyebar keseluruh dunia menjadi pandemic Covid-19. Krisis kesehatan ini berdampak pada aspek perekonomian dan sosial dan memaksa berbagai negara untuk melakukan karantina wilayah (*lockdown*). Selain peningkatan indeks bantuan, jumlah penerima manfaat program sembako juga diperluas dari 15.6 juta KPM menjadi 20 juta KPM, upaya penanganan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah perluasan pandemi dan mengurangi dampak sosial-ekonomi yang terjadi (Wiyaka & Murti, 2020).

Program sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan program sembako dengan menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS) ini diperuntukan untuk keluarga kurang mampu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan program sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Target atau sasaran program sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini adalah keluarga penerima manfaat (KPM) dari keluarga miskin masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti pekerjaan utamanya adalah

petani, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung atau pekerja lainnya yang pendapatannya maksimalnya 600 ribu perbulan. Dengan itu tujuannya untuk mengurangi masalah keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Sesuai dengan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako menjelaskan bahwa pelaksanaan program sembako untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar, memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, memiliki kriteria masalah sosial, dan memberikan lebih banyak pilihan serta kendali kepada keluarga penerima manfaat (KPM) program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Mengenai bantuan sosial program sembako, program ini sudah banyak dilaksanakan di wilayah Indonesia. Sebagai salah satu contoh yang menerima program sembako adalah Kota Ternate, yang dimana Ternate sendiri kota yang masuk kategori angka kemiskinan tinggi di Indonesia. Kemiskinan di kota Ternate sendiri secara garis besar disebabkan dua faktor utama yaitu masih terbatasnya infrastruktur, terutama infrastruktur konektivitas baik transportasi maupun komunikasi. Hal ini menghambat akses terhadap pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kedua, yaitu kesempatan kerja yang belum merata dari manfaat pertumbuhan ekonomi tinggi di Maluku Utara Kota Ternate, hal ini disebabkan kesenjangan antara keterampilan dan kualifikasi yang dimiliki sumber daya manusia (SDM).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Angka kemiskinan di Maluku Utara Kota Ternate terus bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, jumlah penduduk miskin di Maluku Utara per Maret 2023 mencapai 83,80 ribu orang. Salah satunya di Dinas Sosial Kota Ternate menyalurkan bantuan itu melalui Bank Rakyat Indonesia, penerima bantuan program sembako di Ternate sebanyak 3116 orang. Data bayar dari Kemensos ini memang sudah diterima sehingga dari data tersebut terdapat sebanyak 3116 penerima KPM. Sedangkan penyaluran bantuan sosial sembako melalui pos sebanyak 4774 Untuk penerima bantuan sosial program sembako di Kota Ternate tahun 2023. program bantuan sosial sembako ini masyarakat mendapatkan nilai uang sebesar 200.000/KPM dengan mendapatkan uang senilai tersebut keluarga penerima manfaat bebas memilih kebutuhannya yang dimana bukan hanya membeli beras dan telur saja namun juga untuk bahan pangan lain seperti daging, ayam, ikan, sayur mayur atau buah. Dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 10 setiap bulan.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya sudah ada beberapa pengantisipasi yang disiapkan oleh pemerintah pelaksana

terkait dengan pelaksanaan program sembako, bila mana nanti penerima manfaat dalam pelaksanaannya terjadi penyelewengan bantuan yang telah diberikan, seperti dana bantuan dibuat untuk jalan-jalan, beli baju yang berfashion dan lain halnya yang bukan dari tujuan program ini tersendiri. Dalam tingkatan nasional, ada tim yang sudah dibentuk yaitu Tim Koordinasi Unit Pelaksana bantuan sosial program sembako dan pada tingkatan kabupaten/kota terdapat juga Tim Koordinasi dan Unit Pelaksana bantuan sosial program sembako dan pada tingkatan kecamatan/kelurahan tersendiri juga terdapat tim yang bertugas sebagai pendamping kelompok- kelompok bantuan sosial program sembako.

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi Administratif kepada pejabat pemerintahan dan peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, apabila keluarga penerima manfaat (KPM) yang melakukan kecurangan dalam pemanfaatan dana bantuan program sembako dikenakan teguran tertulis atau peringatan. Jika setelah mendapat teguran maka penyaluran dana bantuan program sembako dapat dihentikan bagi KPM tersebut atau diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk program sembako sendiri sebenarnya dapat meminimalisir perekonomian masyarakat, akan tetapi program sembako ini memiliki permasalahan seperti terjadi pada pendataan mengenai keluarga penerima manfaat program sembako yang sudah sesuai ketentuan atau belum. Fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada permasalahan terkait administrasi penerima bantuan program sembako yang belum *ter-update* secara menyeluruh sehingga data keluarga penerima manfaat yang lama masih ada. Sehingga hal tersebut menyebabkan bantuan program sembako yang tidak tersalurkan dengan tepat sasaran karena data yang tidak sesuai dengan jumlah keluarga penerima manfaat di lapangan.

Aspek lain yang menjadi permasalahan adalah mekanisme pelaksanaan penyaluran program sembako yang sudah berubah dengan diberikan bantuan secara tunai. Dikarenakan perubahan tersebut keluarga penerima manfaat masih kurang mendapatkan sosialisasi tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran program sembako yang terbaru dan keluarga penerima manfaat terlalu bebas memanfaatkan bantuan secara tunai tersebut. Hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi pelaksana program sembako dalam melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pusat.

Dampak adanya bantuan sosial program sembako ini yang dapat diterima oleh masyarakat kota ternate yaitu dimana sebelumnya program sembako yang awalnya bernama program beras miskin, program beras sejahtera, dan program bantuan pangan non tunai hanya mendapatkan uang sebesar 150.000/KPM untuk membeli beras dan telur saja namun setelah bertransformasi menjadi program sembako ini masyarakat mendapatkan nilai uang sebesar 200.000/KPM dengan mendapatkan uang senilai tersebut keluarga penerima manfaat bebas memilih kebutuhan pangannya yang dimana bukan hanya membeli beras dan telur saja. Bantuan sosial program sembako ini akan bermanfaat sekali terhadap masyarakat kota Ternate sebab akan mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya agar tidak mengalami gizi buruk. Secara makro program sembako merupakan mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, yang mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan pertama yakni tidak ada kemiskinan dan tujuan kedua menghilangkan kelaparan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian tersebut dapat dirumuskan masalah pokok yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin?
2. Apa permasalahan yang dihadapi dari pelaksanaan program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan uraian rumusan masalah diatas adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pelaksanaan program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan dua manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengembangan wawasan, pengetahuan, dan sebagai bahan rujukan dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang kajian kebijakan publik lebih khusus lagi mengenai perumusan sebuah kebijakan dalam pelaksanaan program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktisnya, temuan-temuan yang telah disusun dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas kebijakan yang telah dibuat maupun sebagai bahan penyusunan kebijakan selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan program bantuan sosial. Berdasarkan pada penelitian ini diharapkan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia dapat berjalan secara optimal maupun tepat sasaran dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya. Dalam penelitian ini konsep yang digunakan oleh peneliti adalah konsep penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan dan

menganalisa hasil penelitian. Agar dapat memperoleh kejelasan tentang arti dari penelitian ini diperlukan adanya definisi konsep yang memberikan arahan dan ruang lingkup penelitian sehingga mempermudah dalam penelitian dengan memperhatikan judul dari penelitian, maka konsep-konsep yang dijabarkan kedalam definisi konsep adalah :

1.5.1 Implementasi Kebijakan

Secara teori, suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya melalui proses implementasi. Tidak lebih, tidak kurang. Ada dua cara untuk menerapkan kebijakan publik baik secara langsung melalui pembuatan program, atau secara tidak langsung melalui pembuatan kebijakan turunan atau kebijakan yang merupakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Sangat mudah untuk melihat bagaimana kebijakan diimplementasikan dalam urutan berikut program, proyek, dan kegiatan. Mekanisme pengelolaan umum, khususnya yang digunakan di sektor publik, diadaptasi dalam pendekatan ini.

Terdapat teori dari George C. Edward mengenai implementasi kebijakan, menurut pandangan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yaitu yang pertama ada komunikasi, Komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Pengintegrasian tersebut adalah koordinasi.

Ada Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Ketiga ada Disposisi, disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Keempat ada Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

1.5.2 Program Sembako Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan

Program sembako merupakan pengembangan dari program beras miskin (raskin), beras sejahtera (rastra), dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Program sembako mulai dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2020. Jenis bahan pangan yang dapat dibeli oleh keluarga penerima manfaat, yaitu sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati maupun vitamin dan mineral. Upaya dari pemerintah untuk memberikan akses keluarga penerima manfaat terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi yang beragam sebagai upaya untuk mencegah *stunting*. Program sembako diharapkan dapat memberikan pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam menentukan jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan.

Program sembako diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang berpendapatan rendah. Program sembako adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. Sedangkan besaran program sembako periode bulan januari-februari 2020 Rp. 150.000 namun sejak periode bulan maret-agustus 2020 dinaikan menjadi Rp.200.000,- per keluarga penerima manfaat per bulannya. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dapat dib elanjutkan dalam bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam kartu kesejahteraan sosial (KKS). Bantuan ini hanya dicairkan dalam bentuk sembako yang terdiri dari beras, telur, daging ayam, dan buah-buahan.

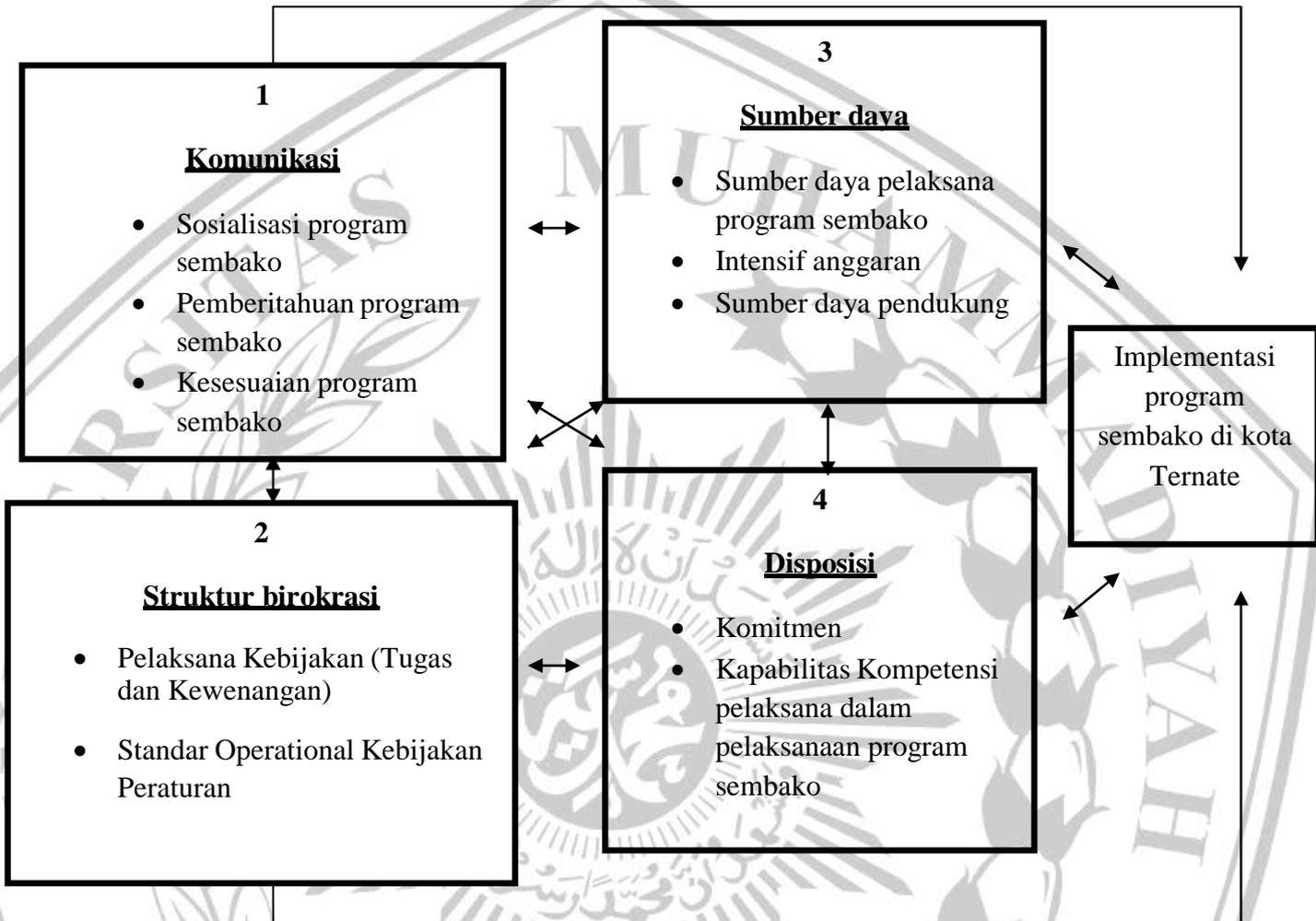
1.5.3 Masyarakat Miskin

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial krusial yang telah berlangsung lama, namun faktanya hingga sekarang masalah ini belum tuntas diselesaikan. Kemiskinan ada di mana pun di seluruh dunia, baik itu negara yang masih tergolong miskin atau negara berkembang seperti Indonesia, Sebagai warga negara, ketika seseorang/keluarga menderita masalah miskin, masalah kemiskinan tersebut bukan hanya menjadi masalah individu/keluarga itu saja, tetapi sudah menjadi masalah pemerintah atau negara. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap seluruh warga negaranya. Semakin tinggi angka kemiskinan, maka akan semakin sulit pula penanganannya.

Tingginya angka kemiskinan pada suatu negara akan dianggap sebagai salah satu persoalan serius karena hal tersebut dianggap sebagai penghambat keberhasilan pembangunan. Salah satu negara yang masih dibelit oleh masalah kemiskinan tersebut adalah negara Indonesia. Biro Pusat Statistik melaporkan bahwa setiap tahun angka kemiskinan Indonesia cenderung menurun, namun faktanya di lapangan menunjukkan hal yang berbeda utamanya selama masa Pandemi Covid-19 periode Maret 2020 sampai dengan awal tahun 2022. Diduga karena buruknya kondisi sosial, ekonomi, politik negara, sehingga banyak lahir orang miskin baru (OMB) atau keluarga miskin baru (KMB).

1.1 kerangka Berfikir

Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir



Kerangka berfikir penelitian diatas berdasarkan dari teori implementasi menurut Edward III yang menjadi dasar analisis implementasi bantuan sosial program sembako di kota Ternate. Dalam melakukan analisis, terdapat 4 indikator yang saling berkaitan satu sama lain yaitu Komunikasi, Struktur birokrasi, Sumberdaya, Disposisi. Indicator pertama ialah komunikasi yang dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat.Selain itu, pada indikator ini juga dapat dilakukan dengan cara koordinasi antara Dinas Sosial, Pihak penyalur, dan pendamping sosial.

Kedua yaitu Struktur birokrasi menjadi indikator kedua dalam melihat baik atau buruknya pelaksanaan bantuan sosial program sembako di Kota Ternate.

Indikator ini dapat didorong melalui pelaksana kebijakan (tugas dan kewenangan bidang pemberdayaan sosial), dan SOP. Selain itu, item SOP dari dinas Sosial harus sesuai dengan peraturan Menteri Sosial nomor 4 tahun 2023 tentang pelaksanaan program sembako

Selanjutnya yaitu Sumber daya, Adapun hal-hal yang dapat membantu Dinas Sosial dalam Pelaksanaan bantuan sosial program sembako di Kota Ternate dengan cara melihat faktor dari Sumber Daya Manusia di Bidang pemberdayaan sosial yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik. Kemudian di Sumber daya pendukung dapat dilihat dari sisi alat, seperti ketersediaan tempat serta alat – alat yang dibutuhkan untuk melakukan pelaksanaan bantuan sosial program sembako.

Dan terakhir ialah Disposisi, Disposisi berkaitan dengan sikap komitmen, dalam Dinas Sosial pasti ada visi misi dalam menjalankan tugas, apakah Dinas Sosial kota Ternate sudah sesuai komitmen dalam melakukan implementasi bantuan sosial program sembako. serta harus adanya penempatan staf sesuai dengan keahlian di bidangnya dan insentif yang diberikan kepada masing – masing staf dapat sesuai dengan porsinya.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Kebijakan Program Sembako di Kota Ternate

1. Komunikasi dalam pelaksanaan program sembako
 - a. Sosialisasi Program Sembako
 - b. Pemberitahuan Program Sembako
 - c. Kesesuaian Program Sembako
2. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program sembako
 - a. Pelaksana Kebijakan (Tugas dan Kewenangan)
 - b. Standar Operational Procedur Kebijakan
3. Sumberdaya dalam pelaksanaan program sembako
 - a. Sumber daya pelaksana program sembako
 - b. Intensif anggaran pelaksanaan program sembako
 - c. Sumber daya pendukung
4. Sikap pelaksana dalam pelaksanaan program sembako
 - a. Komitmen pelaksanaan program sembako

- b. Kapabilitas kompetensi pelaksana dalam pelaksanaan program sembako.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang di tempat penelitian. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin di kota Ternate berdasarkan peraturan Menteri Sosial No 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan program sembako. Dengan harapan hasil penelitian yang nantinya akan dilakukan mampu memberikan gambaran yang nyata mengenai kondisi di lapangan dan tidak hanya sekedar sajian data.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif dianggap lebih luas dan lebih terperinci karena tidak hanya meneliti masalahnya akan tetapi juga variabel lain yang berhubungan dengan masalah tersebut . Penelitian deskriptif kualitatif lebih bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan serta menjawab permasalahan yang diteliti dengan terperinci. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin. Dengan harapan hasil penelitian yang nantinya akan dilakukan mampu memberikan gambaran yang nyata mengenai kondisi di lapangan dan tidak hanya sekedar sajian data.

1.7.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Secara terperinci akan dijelaskan sebagai berikut :

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dan biasanya didapatkan pada saat melakukan penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari orang-orang yang terkait langsung dengan permasalahan tanpa melalui perantara, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu di Kementerian Sosial di Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan dan Dinas Sosial Kota Ternate di Pemberdayaan Sosial.

b) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:137) data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Data sekunder ini bisa didapatkan melalui orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder dapat dikatakan sebagai pelengkap data yang diperlukan dari data primer. Data sekunder yang mendukung dalam penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang didapat saat penelitian yaitu salinan peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan program sembako, buku pedoman pelaksanaan program sembako, buku literature, dan jurnal penelitian, Arsip-arsip maupun lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yang harus membutuhkan data yang jelas dan spesifik. Menurut Sugiyono (2018:224) menjelaskan bahwa pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengumpulan data dapat dikatakan sebagai langkah strategis yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam menyelesaikan permasalahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif memungkinkan memperoleh data dengan waktu yang relative lama. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:224) dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi atau kepustakaan untuk memperkuat kebenaran data yang akan dianalisis. Studi dokumentasi ini memungkinkan ditemukannya perbedaan atau pertentangan hasil wawancara dan observasi dengan hasil yang terdapat dalam dokumen. Dokumen yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk mendukung penelitian ini berupa Peraturan Menteri Sosial No 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan program sembako, pedoman umum pelaksanaan program sembako, Peraturan Presiden No.110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial No 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Bila hal ini terjadi dapat mengkonfirmasi dengan bentuk wawancara. Pengumpulan data dapat melalui data peninggalan tertulis seperti arsip, catatan khusus dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Penggunaan metode dokumentasi ini sangat berguna untuk mendapatkan data catatan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data atau dengan menggunakan wawancara non struktur sehingga lebih terbuka bagi peneliti untuk berdialog atau tanya jawab langsung. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa narasumber yang dianggap penting dalam masalah yang akan dikaji oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara bersama bapak Joni selaku ketua monitoring dan evaluasi di Kementerian Sosial dan Bapak Iskandar selaku staff Dinas Sosial Kota Ternate yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program sembako. Wawancara ini bertujuan untuk menggali data dan mencari jawaban

terhadap hipotensi kerja serta menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Responden biasanya terdiri atas mereka yang memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, serta lebih mengetahui informasi yang dibutuhkan. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi langsung melalui tanya jawab. Peneliti melakukan wawancara ini dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Kota Ternate.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengolahan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi dilakukan dengan mengamati obyek penelitian secara langsung. Selain itu, observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung dapat memberikan informasi atau data kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat memahami dengan baik obyek dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Sosial dalam pelaksanaan program sembako. Obyek penelitian tersebut digunakan oleh peneliti sebagai upaya untuk mengsingkronkan data dan fakta sesuai dengan tema penelitian yang dikaji. Observasi lain juga dilakukan di Dinas Sosial Kota Ternate sebagai pengumpulan data peneliti untuk melihat fakta terkait dengan pelaksanaan program sembako sehingga dari fakta yang ada peneliti dapat mengetahui bahwa masih belum adanya permasalahan dalam pelaksanaan program sembako.

1.7.4 Subjek penelitian

Subyek penelitian merupakan orang atau pelaku yang menguasai dan terlibat langsung terkait permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan subyek penelitian kepada Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kota Ternate. Dari hasil wawancara subyek penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan data terkait mengenai pelaksanaan program sembako di kota Ternate berdasarkan peraturan Menteri Sosial no 4 tahun 2023 tentang pelaksanaan program sembako. Selain hal tersebut, diharapkan

subyek penelitian dapat membantu peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam pengambilan sample.

1.7.5 Teknik analisis data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Terdapat tiga model analisis data yang peneliti gunakan secara kualitatif yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pengumpulan data penelitian, dimana penelitian dapat menemukan kapan saja waktu untuk menemukan data yang banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara atau dari berbagai dokumen seperti Peraturan Menteri Sosial No 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan program sembako, pedoman umum pelaksanaan program sembako, Peraturan Presiden No.110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial No 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Reduksi data dilakukan untuk meringkas kembali catatan-catatan lapangan dalam memilih hal-hal yang penting. Selama proses reduksi data, peneliti dapat melakukan ringkasan, pengkodean, dan menemukan tema. Reduksi data dapat dikatakan sebagai proses analisis penajaman untuk mengkoordinasikan data, dengan demikian kesimpulannya ini dapat di verifikasi untuk dijadikan temuan penelitian terhadap masalah yang akan diteliti.

b. Penyajian data

Proses penyajian data biasanya berbentuk teks naratif atau mengelompokkan data sesuai dengan sub babnya masing-masing yang

diperoleh kedalam sejumlah matriks atau kategori setiap data yang didapat berupa dokumen Peraturan Menteri Sosial No 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan program sembako, pedoman umum pelaksanaan program sembako, Peraturan Presiden No.110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial No 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian setelah terkumpul data yang telah dikelompokkan dilakukan klasifikasi data kedalam bentuk tabel dan grafik serta narasi dalam penelitian yang disesuaikan dengan topic penelitian. Penyajian data akan terlihat dengan jelas dan tersusun sistematis.

c. Kesimpulan

Kesimpulan adalah analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data, sehingga data tersebut dapat disimpulkan. Penarikan kesimpulan di dalam penelitian ini didasarkan pada kevalidan hasil penelitian yang di hubungkan dengan fakta yang ditemukan di lapangan pada saat penelitian terkait dengan pelaksanaan program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin kemudian di disinkronisasikan pada dokumen yang telah di dapatkan berupa Peraturan Menteri Sosial No 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan program sembako, pedoman umum pelaksanaan program sembako, Peraturan Presiden No.110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial, setelah itu dalam penarikan kesimpulan terdapat sebuah temuan dalam penelitian hingga terbentuknya saran.